

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Pekalongan

Halaman 9

Dikucurkan Bantuan 1.435 Rumah Tidak Layak Huni

KAJEN - Sebanyak 1.435 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Tengeng Kulon, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan mendapatkan bantuan dana stimulan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan. Jumlah total anggarannya Rp 16 miliar yang terbagi masing-masing rumah antara Rp 10 juta dan Rp 15 juta.

Bantuan tersebut diserahkan sendiri secara simbolis oleh Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, di Balai Desa Tengeng Wetan, Kecamatan Siwalan, Senin (31/7) kemarin. Sedangkan sebelumnya pada tahun 2016, Pemkab Pekalongan telah melakukan rehab rumah tidak layak huni sebanyak 1.061 unit rumah. Namun yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 200 unit, dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pe-

kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak 230 unit dan dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebanyak 80 unit serta dari Dana Desa (DD) sebanyak 544 unit.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asip menyampaikan kepada penerima bantuan rehab RTLH agar digunakan dengan baik dan benar sesuai amanat perjanjiannya. Sehingga bantuan dana stimulan tersebut, bisa bermanfaat dan rumah yang sebelumnya kumuh menjadi lebih baik.

Menurutnya, jika dana stimulan rehab digunakan untuk kebutuhan lain, akan merugikan bagi penerima bantuan serta rumah yang tidak layak huni menjadi kian kumuh. Selain itu, Tim Pengawas yang akan mengawasi bantuan tersebut agar tepat sasaran. "Jangan sampai ketika diberikan bantuan oleh

pemerintah untuk memperbaiki rumah, malah untuk membeli handphone baru atau barang lainnya," ingat Bupati Asip.

Bupati Asip juga mengingatkan jika bantuan tersebut dilaksanakan dengan baik, akan mendatangkan kebarokahan penerimanya. Meskipun sedikit, namun akan memiliki rasa berkecukupan. Allah SWT akan menyusulkan rizki lainnya, sehingga penerima akan mampu mendirikan rumah yang layak dan bagus. Jika disalahgunakan, dapat menutup pintu rizki penerima bantuan sendiri. "Barokah itu, meskipun sedikit akan cukup. Namun jika tidak barokah, membangun rumah Rp 10 miliar pun kurang," kata Bupati Asip.

Bupati Asip juga menegaskan bahwa paradigma tugas pemerintah sekarang adalah *khodimul ummah*. Yakni, bertugas melayani masyarakat sehingga

sejahtera. Jadi, bukan zamannya minta dilayani.

"Karena itu, kami akan melakukan evaluasi rutin setiap kinerja Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), termasuk kinerja kepala desa yang mengelola dana desa dalam jumlah besar," tegas Bupati Asip.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim dan LH), Kabupaten Pekalongan, Trinanto, menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan kali ini adalah stimulan untuk pembangunan rumah tidak layak huni yang akan diberikan kepada warga kurang mampu. "Kegiatan ini dalam rangka penyerahan secara simbolis, bantuan RTLH oleh bupati sebagai tanda dimulainya kegiatan fisik RTLH tahun 2017," jelas Trinanto. (thd/ida)